

BAB V

KESIMPULAN

Pemekaran Nagari Seulayat Ulakan dari Nagari Ulakan didorong oleh aspek sosial, ekonomi, dan administrasi. Pertumbuhan jumlah penduduk di Nagari Ulakan menghambat efektivitas pelayanan dan pengelolaan administrasi, sehingga pemekaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, keterbatasan dana di nagari induk menjadi faktor penting karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk mengelola 19 korong sekaligus. Pemekaran diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dengan fokus pada wilayah yang lebih kecil.

Dukungan dari masyarakat dan pemuka adat juga menjadi faktor pendorong, karena mereka ingin mengembangkan nagari dengan perhatian lebih terhadap kebutuhan lokal. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 1 Tahun 2013 yang mendukung pembentukan nagari baru menjadi alasan utama dalam proses pemekaran ini. Pemekaran bertujuan mempercepat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan sektor ekonomi seperti UMKM dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dalam wilayah yang lebih mandiri.

Proses pemekaran Nagari Seulayat Ulakan dari Nagari Ulakan melibatkan langkah-langkah administratif dan sosio-politik yang kompleks, dimulai sejak munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 1 Tahun 2013 yang mengatur pembentukan nagari baru. Langkah awalnya adalah musyawarah antara tokoh adat, BAMUS, dan masyarakat pada tahun 2011 yang menyepakati wilayah

yang akan memekar. Empat korong, yakni Lapau Kandang, Maransi, Kampung Ladang, dan Tiram Ulakan, dipilih sebagai wilayah baru, yaitu Nagari Seulayat Ulakan.

Pada tahun 2016, Nagari Seulayat Ulakan resmi berdiri secara mandiri dengan dukungan BAMUS, yang mewakili aspirasi masyarakat setempat. Struktur pemerintahan mulai dibangun, termasuk pengangkatan Nurmalis S.E., M.M. sebagai penjabat sementara wali nagari sebelum dilakukannya Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) pertama pada tahun 2018. BAMUS kemudian membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk menyelenggarakan PILWANA yang dipersiapkan secara demokratis dengan keterlibatan semua korong.

Pasca pemekaran, pembangunan infrastruktur seperti kantor wali nagari, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan diperluas untuk mendukung fungsi pemerintahan baru. Proses ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak hanya memperkuat pemerintahan lokal, tetapi juga meningkatkan partisipasi politik warga melalui pemilihan kepala nagari, serta membuka kesempatan lebih luas dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal.

Pasca pemekaran pada tahun 2016, Nagari Seulayat Ulakan mengalami perkembangan signifikan di berbagai bidang hingga tahun 2023. Di bidang pemerintahan, struktur yang lebih mandiri memungkinkan peningkatan efektivitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang lebih responsif. Ini terlihat dalam partisipasi masyarakat yang meningkat, seperti dalam Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) pada 2018 yang pertama kali diadakan secara lokal.

Dampak ekonomi juga terasa dengan berkembangnya sektor UMKM, terutama produk khas seperti buah nipah dan sala lauak, yang mendapat dukungan modal dan pelatihan dari pemerintah nagari. Dukungan ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan peluang kerja tambahan. Selain itu, pembangunan infrastruktur mengalami percepatan, terutama jalan akses di berbagai korong dan fasilitas publik seperti posyandu dan Masjid Jami Syech Burhanuddin. Dengan adanya akses yang lebih baik, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Namun, tantangan seperti bencana banjir yang terjadi setiap tahun, termasuk pada 2023, tetap menjadi kendala bagi Nagari Seulayat Ulakan. Meski demikian, masyarakat bersama pemerintah nagari berupaya mengatasi dampak banjir melalui kerja sama dalam penanganan darurat dan pemulihan. Secara keseluruhan, pemekaran ini telah mendorong Nagari Seulayat Ulakan untuk menjadi lebih adaptif dan mandiri, serta semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

